

Mahrus Ali

ISU ISU KONTEMPORER HUKUM PIDANA



Daftar isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
 BAB I KORUPSI DALAM DIMENSI HAK ASASI MANUSIA	1
A. Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia	1
1. Isu Hak Asasi Manusia dalam Korupsi	1
2. Konsep dan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia ...	4
3. Generasi Hak Asasi Manusia	6
4. Tiga Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	8
5. Memaknai Korupsi dalam Konteks Hak Asasi Manusia	9
6. Kerangka Teoretik Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	11
7. Eksplorasi Hubungan antara Korupsi dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	12
B. Dimensi Hak Asasi dalam Putusan-putusan Perkara Korupsi.....	20
1. Deskripsi Putusan-putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi	20
2. Analisis Keterkaitan antara Putusan-putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia	27
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim Tidak Mengkaitkan antara Tindak Pidana Korupsi dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia	50
C. Sistem Pemidanaan Perkara Korupsi Berbasis Hak Asasi Manusia	60
1. Pengertian Sistem Pemidanaan.....	60
2. Sistem Pemidanaan Perkara Korupsi Berbasis Hak Asasi Manusia.....	61

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDUK

PERUSAHAAN ATAS TINDAK PIDANA OLEH ANAK

PERUSAHAAN	65
A. Isu Terkini Seputar Perusahaan Grup (<i>Multinational Corporation</i>)	65
B. Sekilas tentang Perusahaan Grup	70
C. Lepasnya Induk Perusahaan dari Tanggung Jawab Pidana atas Tindak Pidana oleh Anak Perusahaan	73
1. Membongkar Realitas di Balik Penggunaan Doktrin <i>Separate Legal Entity</i> dan <i>Limited Liability</i>	73
1. Dominasi Negara Maju terhadap Negara Berkembang	78
D. Alasan Perlunya Induk Perusahaan Bertanggungjawab Secara Pidana atas Tindak Pidana oleh Anak Perusahaan	80
1. Dari Keterpisahan Entitas Hukum ke Kesatuan Ekonomi	80
2. Kontrol Induk Perusahaan terhadap Anak Perusahaan	82
3. Mewujudkan Keadilan Hukum bagi Korban	84
E. Pertanggungjawaban Pidana Induk Perusahaan atas Tindak Pidana oleh Anak Perusahaan	85

BAB III PROPORSIONALITAS DALAM KEBIJAKAN

FORMULASI SANKSI PIDANA	99
A. Ragam Arti Proporsionalitas	99
B. Proporsionalitas Pidana dan Aliran Konsekuensial .	104
C. Elemen Kunci Proporsionalitas Pidana	110
D. Proporsionalitas Kardinal dan Ordinal	113
E. Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana	115
1. Korupsi Terkait Kerugian Keuangan Negara	115
2. Delik Suap dan Menerima Gratifikasi	118
3. Delik Pencucian Uang	123
4. <i>Obstruction of Justice</i>	125
5. Membuka Lahan dengan Cara Membakar	128

6. Pejabat Mengeluarkan Izin Melanggar UU.....	130
7. Delik Omisi oleh Pejabat.....	132

BAB IV FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA SEBAGAI

ULTIMUM REMEDIUM DALAM UU PPLH.....	135
A. Isu Hukum.....	135
B. Asas <i>Ultimum Remedium</i>	139
1. Arti <i>Ultimum Remedium</i>	139
2. Alasan yang Mendasari Hukum pidana sebagai <i>Ultimum Remedium</i>	141
C. Beberapa Prinsip dalam Hukum Lingkungan.....	143
1. Pembangunan Berkelanjutan	143
2. Keadilan Antargenerasi	145
3. Prinsip <i>Ubiquity</i>	147
D. Problem Teoritis Fungsionalisasi Hukum Pidana sebagai <i>Ultimum Remedium</i> Hanya pada Delik dalam Pasal 100 ayat (1) UU PPLH.....	148
E. Hukum Pidana sebagai <i>Ultimum Remedium</i> dalam UU PPLH Dikaitkan dengan Karakteristik Delik Lingkungan.....	154

DAFTAR PUSTAKA	159
INDEX.....	177